

Pemerintah Aceh

2023

Laporan Kinerja DKP



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja

Jl. Sisingamangaraja Ujung Telp. 0651-22951 - website. dkp.acehprov.go.id

KATA PENGANTAR



Fokus agenda kerja Pemerintah Aceh sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023 yaitu “Memacu pengembangan kawasan strategis dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing daerah dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”. Belanja pemerintah diefektifkan sesuai dengan prioritas pembangunan Aceh yaitu pengembangan kawasan strategis, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM dalam meningkatkan daya saing, serta memacu pertumbuhan ekonomi terutama bidang kelautan dan perikanan.

Untuk mendukung hal tersebut, DKP Aceh telah melaksanakan berbagai program sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2023. Pencapaian Program diukur melalui pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Dinas. Guna memastikan target IKU tercapai, DKP Aceh melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Gubernur Aceh sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dan laporan ini disusun mengacu pada Pedoman Laporan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, sesuai dengan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai bentuk peran aktif Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Seluruh kebijakan yang dilaksanakan tahun 2023 merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis Gubernur Aceh, yang dalam sistem pengelolaan kinerjanya ditetapkan dalam 2 Sasaran Strategis dan 9 Indikator Kinerja Utama. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja tahun 2023 termasuk capaian target beserta analisisnya. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tahun 2023, akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya.

Perbaikan budaya kerja dengan mengusung nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh akan menjadi modal utama peningkatan kinerja. Disamping itu, kerja keras jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh serta dukungan lintas sektor, instansi terkait lainnya, seluruh pemangku kepentingan akan menjadikan sinergi pencapaian target pada tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan buku ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya, kami ucapkan terima kasih

Banda Aceh, Februari 2024
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh


ALIMAN, S.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Tugas dan Fungsi DKP Aceh	2
1.4. Struktur Organisasi	4
1.5. Sumber Daya Manusia DKP Aceh	6
1.6. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Aceh ..	8
1.7. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	11
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Rencana Strategis Tahun 2023 – 2026	12
2.2. Indikator Kinerja Utama	17
2.3. Penetapan Kinerja	17
2.4. Program Instansi	18
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. Capaian Kinerja	22
3.2. Analisa dan Evaluasi Kinerja	24
3.3. Kinerja Anggaran DKP Aceh	51
BAB 4. PENUTUP	54
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

1.1. Rincian ASN dan Tenaga Kontrak DKP Aceh Berdasarkan Jabatan	06
1.2. Rincian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan	06
1.3. Rincian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan	07
2.1. Visi dan Misi Pemerintahan Aceh, Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan .	15
2.2. Perjanjian Kinerja DKP Aceh Tahun 2023	18
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama DKP Aceh Tahun 2023	23
3.2. Perkembangan Capaian NTN Tahun 2023	26
3.3. Perkembangan Capaian NTPi Tahun 2023	29
3.4. Capaian Produksi Perikanan 2023	31
3.5. Capaian Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2019-2023 (Ton)	32
3.6. Rincian Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2016-2022 Menurut Komo ditas Utama (Ton)	34
3.7. Capaian Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2019-2023 (Ton)	35
3.8. Rincian Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2019-2023 Menurut Komoditas Utama (Ton)	35
3.9. Capaian Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan Tahun 2019-2023	38
3.10. Capaian Nilai Ekspor Perikanan Aceh Tahun 2019-2023	39
3.11. Capaian Angka Konsumsi Ikan Tahun 2019-2023	41
3.12. Capaian Produksi Garam Tahun 2019-2023 (Ton)	43
3.13. Produksi Garam (Ton) Per Kabupaten Sentra Garam Aceh	44
3.14. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	47
3.15. Capaian Persentase Kawasan Konservasi Yang Dikelola 2021-2023	48
3.16. Hasil Penilaian Evika KKPD Aceh 2021-2023	48
3.17. Capaian Persentase Kawasan Konservasi Yang Dikelola 2021-2023	50
3.18. Capaian Nilai Kinerja Anggaran DKP Aceh Tahun 2023	52
3.19. Pagu dan Realisasi Anggaran DKP Aceh Berdasarkan Program 2023....	53

DAFTAR GAMBAR

1.1. Struktur Organisasi DKP Aceh	5
3.1. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) selama tahun 2019-2023	27
3.2. Peningkatan Sarpras Pelabuhan dan Bantuan Alat Tangkap Tahun 2022	28
3.3. Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Selama Tahun 2019-2023	29
3.4. Bantuan Benih, Pakan dan Sarpras Program Budidaya Tahun 2023.....	30
3.5. Perkembangan Produksi Perikanan Selama Tahun 2019-2023	32
3.6. Kegiatan Gemarikan dalam Meningkatkan Konsumsi Ikan di Aceh	42
3.7. Modernisasi Produksi Garam di Tahun 2023	45
3.8. Kerangka Penilaian EVIKA	47
3.9. Kegiatan Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	50
3.10. Grafik Pagu, Realisasi dan Sarapan Anggaran APBA DKP Aceh Tahun 2019-2023	52

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	58
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2023	59
2. Penghargaan Tahun 2023	60

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Gubernur Aceh. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sepanjang tahun 2023, Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh telah menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan semakin meningkatnya capaian Kinerja beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun demikian, beberapa indikator Kinerja utama masih belum tercapai atau memerlukan kerja keras untuk dapat mencapainya di tahun 2024 disebabkan pencapaiannya Indikator Kinerja Utama tersebut mengalami perlambatan. Secara umum Nilai rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis DKP Aceh Tahun 2023 sebesar 103,98% atau mengalami peningkatan sebesar 8,36% dari tahun 2022.

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dari 9 IKU yang targetnya telah ditetapkan pada awal tahun 2023, terdapat 7 IKU yang pencapaiannya melebihi target dan 2 IKU yang belum dapat mencapai target, namun sudah pada kategori baik;
2. IKU yang capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan (capaian > 100%) adalah: 1). Nilai tukar nelayan, 2). Nilai tukar pembudidaya ikan, 3). Produksi perikanan, 4). Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh 5). Konsumsi ikan, 6). Persentase kawasan

- konservasi yang dikelola, dan 7). Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. 2 IKU yang capaiannya belum sesuai target (capaian <100%) adalah: 1). Nilai Ekspor Perikanan dan 2). Produksi garam.

Kinerja keuangan DKP Aceh tahun 2023 dilaksanakan melalui pelaksanaan 6 program dalam APBA. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DPA Awal terbit sebesar Rp. 91.327.545.325,- dan terdapat penambahan sebesar Rp. 3.192.158.906,- menjadi Rp. 88.135.386.419,- pada DPA perubahan. Sampai dengan akhir tahun 2023 dapat direalisasi sebesar 97,97%. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan DKP Aceh tahun 2023 telah dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi stakeholders kelautan dan perikanan.

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang akan berdampak positif dalam rangka mencapai visi dan misi Gubernur Aceh.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem AKIP merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi. Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pencapaian kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Oleh karena itu, setiap lembaga wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja tersebut merupakan sarana akuntabilitas bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh untuk mengukur pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengelolaan dinas dan sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai visi, misi serta tujuan dan sasaran kerja sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis DKP Aceh tahun 2023-2026, dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023 terdapat 2 sasaran strategis dengan 9 IKU (Indikator Kinerja Utama) yang merepresentasikan keberhasilan pencapaian dalam pembangunan kelautan dan perikanan Aceh. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut, DKP Aceh melaksanakan 6 (enam) program utama pembangunan

kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh 9 Unit Kerja Eselon III di lingkup DKP Aceh.

Untuk memastikan keseluruhan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan sasarannya, telah disepakati perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dengan Eselon III dan diturunkan secara berjenjang sampai tingkat individu pegawai.

Capaian kinerja tersebut kemudian dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Permen PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) pada setiap akhir tahun kepada Gubernur melalui Biro Organisasi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja DKP Aceh tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran DKP Aceh. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja DKP Aceh Tahun 2023 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran DKP Aceh selama tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja.

1.3. Tugas dan Fungsi DKP Aceh

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Tugas DKP Aceh adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah Aceh dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Aceh.

Dalam melaksanakan tugas tersebut DKP Aceh menyelenggarakan fungsinya

:

- A. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- B. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi terhadap perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- C. Pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- D. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- E. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 Gross Tonnage (GT);
- F. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- G. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- H. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- I. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- J. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT;

- K. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap fasilitasi dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi;
- L. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- M. Pelaksanaan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- N. Pelaksanaan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- O. Pelaksanaan fasilitasi terhadap dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT;
- P. Pembinaan UPTD;
- Q. dan Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kelautan dan perikanan.

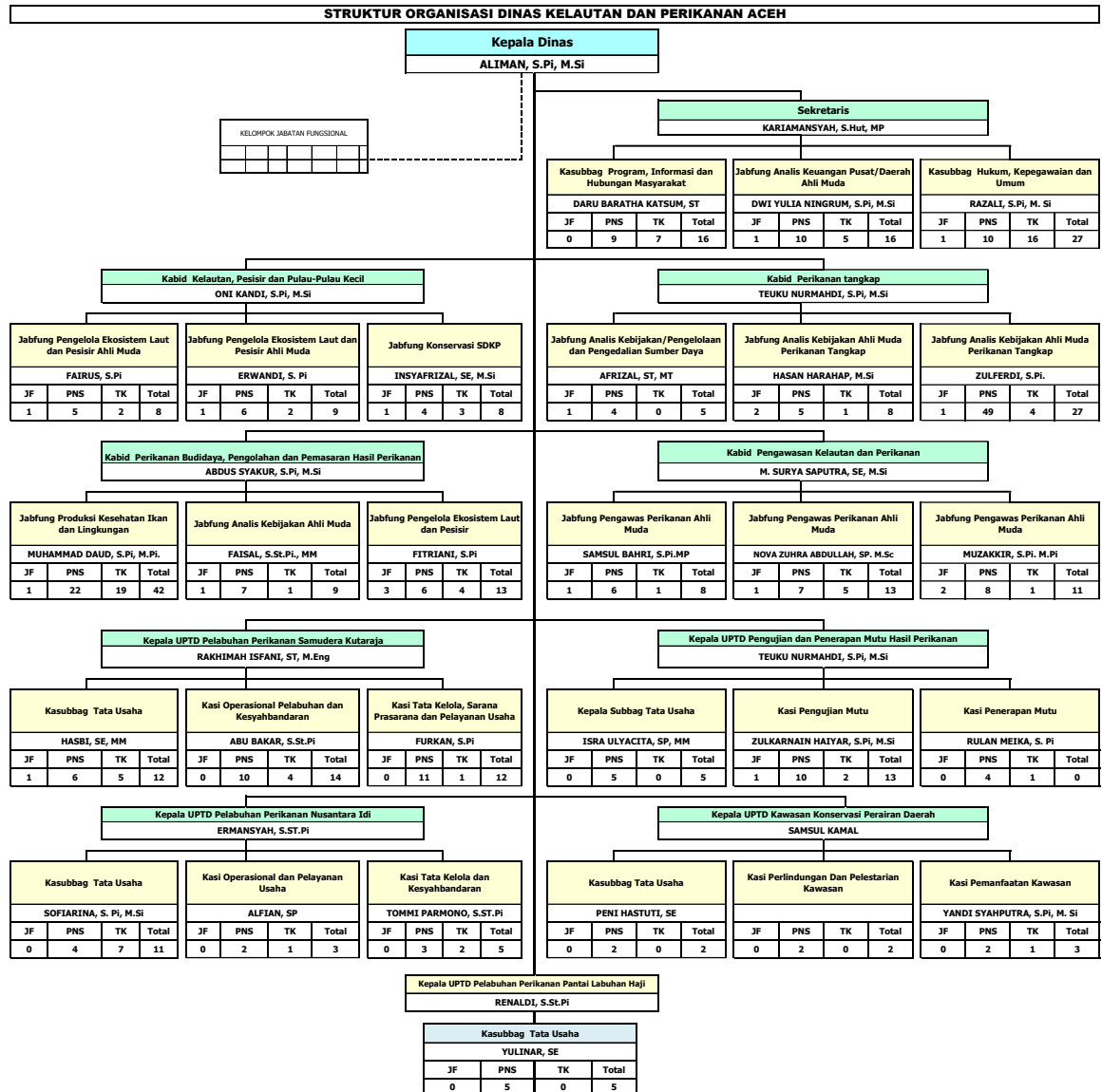
1.4. Struktur Organisasi

Kelembagaan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (DKP Aceh) dibentuk berdasarkan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Susunan organisasi DKP Aceh terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
4. Bidang Perikanan Tangkap;
5. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

6. Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

GAMBAR 1.1. STRUKTUR ORGANISASI DKP ACEH



1.5 Sumber Daya Manusia DKP Aceh

Susunan kepegawaian pada DKP Aceh hingga tahun 2023 sebanyak 342 orang yang terdiri dari 26 orang pejabat struktural dengan persentase 7.6%, 21 orang pejabat fungsional 6.1%, 200 orang staf dengan persentase 58.5%, dan 95 orang tenaga kontrak dengan persentase 27.8%. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai DKP Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.1.

TABEL 1.1. RINCIAN PEGAWAI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH BERDASARKAN JABATAN

No.	Jabatan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Struktural	26	7,6%
2.	Fungsional	21	6,1%
3.	Staf	200	58,5%
4.	Tenaga Kontrak	95	27,8%
	Jumlah	342	100%

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian DKP Aceh, 2021

Menurut golongan jumlah Pegawai Negeri Sipil pada DKP Aceh sebanyak 247 orang, terdiri dari golongan IV sebanyak 31 orang, golongan III sebanyak 174 orang, golongan II sebanyak 38 orang, dan golongan I sebanyak 4 orang. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2.

TABEL 1. 2 RINCIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN GOLONGAN

Golongan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
IV	31	12,6%
III	174	70,4%
II	38	15,4%
I	4	1,6%
Jumlah	247	100 %

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian DKP Aceh, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah PNS pada, golongan IV sebesar 12,6%, golongan III sebesar 70,4%, golongan II sebesar 15,4%, dan

golongan I sebesar 1,6%. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa DKP Aceh memiliki persentase tertinggi pada Golongan III sehingga perlu adanya pelatihan-pelatihan dan pendidikan untuk menunjang peningkatan golongan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DKP Aceh didukung oleh sejumlah aparatur yang memiliki disiplin ilmu dalam berbagai bidang dan strata pendidikan yang mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Sumber daya manusia berdasarkan disiplin ilmu sesuai dengan keahlian dan strata pendidikan penting untuk diperhatikan agar terciptanya kinerja yang efektif, efisien, dan terintegrasi. Persentase strata pendidikan Pegawai Negeri Sipil pada DKP Aceh terbanyak pada jenjang S1 sebesar 57.1% dan paling sedikit pada jenjang S3 dan SD sebesar 0.4%. Angka persentase strata pendidikan yang lebih tinggi perlu semakin ditingkatkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Rincian jumlah dan persentase Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pendidikan disajikan pada Tabel 1.3 berikut:

TABEL 1.3. RINCIAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PENDIDIKAN

Strata Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
S3	1	0.4%
S2	50	20,2%
S1	141	57,1%
D4	5	2%
D3	4	1,6%
SLTA	42	17%
SLTP	3	1,2%
SD	1	0.4%
Jumlah	247	100%

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian, DKP Aceh, 2021

1.6. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Aceh

A. Potensi

Pembangunan Perikanan dan Kelautan ke depan selain diharapkan dapat mengisi permasalahan yang ada di sektor perikanan dan kelautan juga dapat meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah/ nasional yang antara lain meliputi peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidayaan ikan serta masyarakat pesisir lainnya, penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha dan memperkuat ketahanan pangan nasional serta penerimaan devisa negara melalui pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan.

Provinsi Aceh menyimpan potensi ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang sangat besar, meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya (laut, payau dan air tawar), pengolahan hasil perikanan dan juga pariwisata bahari. Selain itu, potensi energi terbarukan dari laut, seperti air laut dalam (*deep sea water*) masih menjadi tantangan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dimasa yang akan datang. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam, merupakan subsektor kelautan yang belum tergarap secara optimal.

Potensi lestari sumber daya ikan laut Aceh diperkirakan sebesar 272,7 ribu ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah aceh dan perairan (ZEE). Dari seluruh potensi sumber daya ikan tersebut baru dimanfaatkan sebesar 208 ribu ton pada tahun 2017 atau baru 76%. Hasil perikanan tangkap ekonomis penting di Provinsi Aceh terdiri dari 15 jenis ikan dari kelompok ikan pelagis, kelompok ikan demersal, dan kelompok non-ikan (udang, crustacea dan molusca), dimana pada tahun 2023 produksi perikanan tangkap sebesar 247.434,35 ton. Selain itu Aceh memiliki komoditi perikanan tangkap ekonomis dan bernilai ekspor antara lain Tuna, Cucut, Tongkol, Bawal Putih, Bawal Hitam Tenggiri, Kerapu dan Lobster.

Aceh juga memiliki potensi perikanan budidaya yang besar mencapai 76.103,18 ha luas lahan tambak dan 4.056,59 ha luas lahan kolam budidaya. Produksi total perikanan budidaya pada tahun 2021 mencapai 134.270,70 ton terdiri dari budidaya payau sebesar 118.457,26 ton dan produksi budidaya tawar sebesar 15.813,43 ton.

B. Permasalahan

Bidang kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan laut di Aceh yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya perikanan. Adapun peta permasalahan dalam bidang kelautan dan perikanan, antara lain:

1. Belum optimalnya produksi perikanan budi daya (ikan dan rumput laut) dan produksi perikanan tangkap di ZEEI dan laut lepas sebagai sumber pangan perikanan;
2. Belum optimalnya pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan;
3. Belum terkelolanya pulau-pulau kecil sebagai kekuatan ekonomi;
4. Belum optimalnya industri pengolahan perikanan;
5. Ketersediaan BBM untuk nelayan dan pembudidayaan ikan;
6. Belum optimalnya pengawasan UU fishing;
7. Peningkatan kawasan konversi laut nasional;
8. Peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan;
9. Peningkatan iptek kelautan dan perikanan serta diseminasi teknologi; dan
10. Peningkatan tata kelola pembangunan kelautan dan perikanan nasional.

Beberapa wilayah perairan laut Aceh sering terjadi praktik-praktik Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Aceh (WPP 571 dan WPP 572), baik oleh kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal perikanan asing (KIA) menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi. Ancaman IUU Fishing dipicu kondisi sektor perikanan global, dimana beberapa negara mengalami penurunan stok ikan, pengurangan armada kapal penangkapan ikan akibat pembatasan pemberian izin penangkapan sedangkan permintaan produk perikanan makin meningkat. Di sisi lain, kemampuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Aceh belum memadai.

Permasalahan pengembangan perikanan budidaya seperti (i) terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas; (ii) harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas; (iii) potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor; (iv) keterbatasan pengetahuan SDM pelaku usaha perikanan budidaya; (v) keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan budidaya; (vi) manajemen pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal; (vi)implementasi cara berbudidaya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan mandiri) belum optimal diimplementasikan oleh pelaku usaha perikanan budidaya; dan (vii) kondisi infrastruktur yang belum optimal mendukung pengembangan usaha perikanan budidaya secara efisien. Selain itu masih terdapat permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan

Terkait dengan permasalahan garam, selama ini kebutuhan nasional garam dalam negeri dipenuhi dari impor. Sebagai daerah yang memiliki panjang pantai 2.666,27 Km, sudah seharusnya kebutuhan garam daerah dapat dipenuhi dari produksi. Saat ini produksi garam daerah belum dapat memenuhi kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan antara lain oleh belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir, masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana serta masih tingginya biaya logistik. Industri pengolahan ikan, masih membutuhkan bahan baku dengan jenis ikan yang spesifik dan standar kualitas tertentu, serta suplai yang kontinyu. Faktor utama yang menyebabkan utilisasi industri pengolahan ikan rendah adalah suplai bahan baku ikan yang kurang. Saat ini distribusi stok ikan tidak merata antara wilayah pengelolaan perikanan di mana sebagian besar bahan baku ikan terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, perlu didorong regulasi terkait penangkapan ikan untuk bahan baku industri dan regulasi untuk mendorong sistem logistik ikan yang efisien.

1.7. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj DKP Aceh Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- A. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;
- B. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi perencanaan strategis DKP Aceh 2023-2026 dan perjanjian kinerja tahun 2023;
- C. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan DKP Aceh tahun 2023; dan
- D. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja DKP Aceh dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2013-2026

Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke 1 (satu) atau tahun pertama dari Rencana Pembangunan Aceh (RPA) tahun 2023–2026 yang menjabarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dalam bentuk agenda (tujuan) dan prioritas (sasaran) pembangunan program dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2023 perlu dilakukan evaluasi guna mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan.

Penyusunan perencanaan kinerja dilakukan dengan terlebih dahulu mengkaji RPA, Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 mencakup visi-misi gubernur dan wakil gubernur yang berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Aceh. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Dalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan Aceh, visi pembangunan diarahkan untuk ***"Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani"***. Visi tersebut dilakukan dengan pelaksanaan 2 misi pembangunan kelautan dan perikanan yaitu : Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan; dan Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam mendukung visi dan misi Gubernur Aceh yang telah ditentukan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh telah merumuskan beberapa tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan program sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan merefleksikan visi dan misi pemerintah Aceh yang terkait dengan tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dapat terealisasi dengan baik. Tujuan jangka menengah pelayanan DKP Aceh yang telah dirumuskan yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, kemandirian fiskal daerah dan ketahanan pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial ekonomi covid-19.

B. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut dapat dirumuskan sasaran yang menjadi salah satu dasar dalam melakukan penilaian dan pemantauan kinerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan sehingga menjadi alat pemicu terhadap sesuatu yang harus dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang harus dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam kurun waktu 4 tahun kedepan. Sejalan dengan hal tersebut, sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mengacu kepada sasaran jangka menengah yang telah dirumuskan dalam RPA 2023 – 2026. Adapun sasaran yang terkait dengan tupoksi DKP Aceh yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA 2023-2026) yaitu:

1. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan;
2. Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.

C. Strategi

Untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan perlu menerapkan strategi. Strategi merupakan langkah-langkah sistematis yang berisikan program-program unggulan untuk mencapai sasaran, strategi juga dapat dijadikan sarana dalam melakukan transformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Adapun strategi yang digunakan dalam pencapaian visi dan misi tersebut yaitu :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan dan pembudidaya yang didukung teknologi serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap dan budidaya;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) dan perluasan usaha sektor perikanan dan kelautan;
3. Peningkatan produksi dan produktifitas komoditi perikanan dan kelautan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan dan kelautan;
5. Penguatan kapasitas budidaya perikanan;
6. Pengembangan kawasan unggulan berbasis mukim dan lhok;
7. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan produksi garam;
8. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi, produk perikanan
9. Pemetaan preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam daerah;
10. Peningkatan terhadap penegakan hukum, dan pengawasan di bidang kelautan dan perikanan;
11. Memberantas pelanggaran IUU Fishing; dan
12. Pengelolaan wilayah konservasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan.

D. Kebijakan

Adapun arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat untuk Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan dalam rangka Mengatasi Dampak Sosial Ekonomi dari Covid-19;
2. Meningkatkan Kualitas SDM dan Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Sipil, Politik, Sosial, Ekonomi, Masyarakat dan Mensukseskan Agenda Politik Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Serentak;

3. Pembangunan infrastruktur strategis untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam serta Meningkatkan Perdamaian; dan
4. Mengoptimalkan penerapan syariat Islam serta menggalang kemitraan dan peningkatkan pendapatan asli Aceh untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan, dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut :

TABEL 2.1. ISU STRATEGIS PEMERINTAH ACEH (PA), TUJUAN SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN SKPA

ISU STRATEGIS PA : Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19	1. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan 2. Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	1. Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan dan pembudidaya yang didukung teknologi serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap dan budidaya; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) dan perluasan usaha sektor perikanan dan kelautan; 3. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi perikanan dan kelautan;	1. Meningkatkan Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat untuk Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan dalam rangka Mengatasi Dampak Sosial Ekonomi dari Covid-19; 2. Meningkatkan Kualitas SDM dan Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Sipil, Politik, Sosial, Ekonomi, Masyarakat dan Mensukseskan Agenda Politik Pemilihan

		4. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan dan kelautan; 5. Penguatan kapasitas budidaya perikanan; 6. Pengembangan kawasan unggulan berbasis mukim dan lhok; 7. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan produksi garam; 8. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi, produk perikanan 9. Pemetaan preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam daerah; 10. Peningkatan terhadap penegakan hukum, dan pengawasan di bidang kelautan dan perikanan; 11. Memberantas pelanggaran IUU Fishing; dan 12. Pengelolaan wilayah konservasi laut,	Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Serentak; 3. Pembangunan infrastruktur strategis untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam serta Meningkatkan Perdamaian; dan 4. Mengoptimalkan penerapan syariat Islam serta menggalang kemitraan dan meningkatkan pendapatan asli Aceh untuk meningkatkan kemandirian fiskal.
--	--	--	--

		pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan	
--	--	--	--

2.2. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerjanya, maka Dinas kelautan dan Perikanan Aceh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
2. Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPI)
3. Produksi Perikanan (ton)
 - Produksi Perikanan Tangkap (ton)
 - Produksi Perikanan Budidaya (ton)
4. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh (%)
5. Nilai Ekspor Perikanan (USD)
6. Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)
7. Produksi Garam (ton)
8. Persentase kawasan konservasi yang dikelola (%)
9. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%).

2.3. Penetapan Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Penetapan Kinerja DKP Aceh tahun 2023, secara rinci sebagai berikut:

TABEL 2.2. PERJANJIAN KINERJA DKP ACEH TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 2. Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) 3. Produksi Perikanan (ton) - Produksi Perikanan Tangkap (ton) - Produksi Perikanan Budidaya (ton)	102,50 97,54 350.131,21 237.214,46 112.916,75
2.	Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	4. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh (%) 5. Nilai Ekspor Perikanan (USD) 6. Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) 7. Produksi Garam (ton) 8. Persentase kawasan konservasi yang dikelola (%) 9. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	5,30 2.153.806,00 59,37 10.600,00 40,00 62,00

2.4. Program Instansi

Untuk mendukung pencapaian kinerja DKP Aceh tahun 2023, maka dilaksanakan 6 (enam) program pembangunan kelautan dan perikanan. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan tujuan agar terlaksananya penyelenggaraan dan memberikan pelayanan administrasi perkantoran dengan sasaran terwujudnya tertib administrasi perkantoran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan;
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

B. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini bertujuan meningkatnya produksi perikanan budidaya, dengan sasaran program peningkatan produksi perikanan budidaya (volume dan nilai). Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan berupa Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

C. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Tujuan program adalah meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dengan sasaran peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya tangkap. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil;
- b. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- c. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT; dan

- d. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi.

D. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini bertujuan meningkatkan produk olahan hasil perikanan yang dipasarkan baik pasar domestik maupun internasional dan menjamin akan keamanan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Adapun sasaran program yaitu meningkatnya lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu keamanan hasil perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar; dan
- b. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

E. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan di pulau pulau kecil melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

F. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut berperan serta dalam menjaga kelestarian dan pengawasan lingkungan dari kerusakan yang tidak bertanggungjawab dan dimanfaatkannya wilayah laut, pesisir dan kawasan konservasi secara lestari dengan sasaran peningkatan kawasan konservasi perairan. Selain itu, sasarannya adalah Perairan Aceh bebas

Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil; dan
2. Kegiatan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan renangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam memantau capaian kinerja organisasi melakukan pengukuran kinerja secara periodik. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) diukur secara triwulan/semesteran/tahunan sesuai dengan karakteristik IKU dimaksud yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja. Proses penghitungan kinerja menggunakan manual IKU yang telah disusun dan disepakati sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program.

Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh tahun 2023 dijabarkan secara deskriptif dengan membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran strategis. Profil capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa periode tahun yang lalu untuk melihat pola capaian secara tahunan.

Akuntabilitas Kinerja organisasi merupakan wujud kerja yang dapat dinilai dari hasil pengukuran kinerja secara kolektif dari seluruh Unit Kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Pengukuran kinerja tersebut dianalisis berdasarkan penilaian seluruh perjanjian kinerja yang mendukung sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh tahun 2023. Pengukuran realisasi kinerja dilakukan secara berjenjang dan berkala.

Dalam mewujudkan kinerjanya, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh berupaya untuk mencapai realisasi kinerja yang optimal dan memenuhi seluruh target di masing-masing sasaran strategis. Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**TABEL 3.1. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DKP ACEH TAHUN 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	<i>Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan</i>				105,79
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	102,50	110,08	107,39
		Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	97,54	112,55	115,39
		Produksi perikanan (ton)	350.131,21	359.453,95	102,66
		Produksi perikanan Tangkap (ton)	237.214,46	247.434,35	104,31
		Produksi perikanan Budidaya (ton)	112.916,75	112.019,60	99,21
2	<i>Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan</i>				103,56
		Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh (%)	5,30	5,62*	106,04
		Nilai Ekspor Perikanan (USD)	2.153.806,00	2.141.627,00**	99,43
		Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	59,37	65,93*	111,05
		Produksi garam (ton)	10.600,00	9.388,90	88,57
		Persentase kawasan konservasi yang dikelola (%)	40,00	41,98	104,95
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	62,00	69,00	111,29

Keterangan : * angka semetara ** angka sangat sementara

Pada tahun 2023, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh memiliki 2 Sasaran Strategis (SS) dan 9 Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum, capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh pada tahun 2023 didominasi oleh capaian yang diharapkan.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melekat pada masing-masing sasaran strategis, terdapat 7 dari 9 capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melebihi target dengan nilai capaian lebih dari 100%, yaitu: Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi), Produksi Perikanan, Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh, Konsumsi Ikan, Persentase kawasan konservasi yang dikelola dan Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki nilai capaian kurang dari 100 % yaitu : Nilai Ekspor Perikanan dan Produksi Garam.

Berdasarkan paparan deskriptif Tabel 3.1 di atas dapat disimpulkan bahwa, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh di Tahun 2023 secara umum mampu merealisasikan sasaran strategis dan indikator kinerja utamanya dengan optimal dan sesuai target yang diharapkan.

3.2. Analisa dan Evaluasi Kinerja

Analisis capaian kinerja DKP Aceh tiap Sasaran Strategis untuk setiap indikator kinerja utama untuk menjelaskan permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan kedepan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan SKPA. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan

Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan kemakmuran rakyat Aceh, dalam kaitan ini DKP Aceh senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan dan pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya sehingga mampu meningkatkan

pendapatannya. Pendapatan merupakan total pendapatan per orang nelayan/pembudidaya yang dari aktivitas penangkapan ikan atau budidaya yang diperoleh dari hasil penjualan dan tangkapan/produksi setelah dikurangi modal kerja diperoleh dalam 1 (satu) bulan.

Sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan, memiliki tiga IKU (Indikator Kinerja Utama), yakni Nilai Tukar Nelayan (NTN), Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) dan Produksi Perikanan.

Nilai Tukar diperoleh dari perbandingan indeks harga hasil produksi yang dijual oleh nelayan/pembudidaya ikan (It) terhadap indeks harga biaya operasional produksi nelayan/pembudidaya ikan (Ib). Nilai Tukar menunjukkan kemampuan daya tukar dari produk perikanan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi, juga dapat digunakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli nelayan/pembudidaya ikan. Nilai tukar dirumuskan jika lebih dari 100, berarti nelayan memperoleh pendapatan lebih besar dari pengeluarannya, dan sebaliknya, apabila Nilai Tukar kurang dari 100, maka artinya pengeluaran nelayan untuk biaya rumah tangga dan produksi, lebih besar dari uang yang diperoleh dari menjual ikannya. Semakin tinggi Nilai Tukar, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli nelayan/pembudidaya ikan, oleh sebab itu Nilai Tukar bisa dipergunakan sebagai indikator dini tingkat kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan. Apabila dilihat dari capaiannya ditahun 2023, maka capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) di atas angka 100 dan mencapai target tahun 2023 dan begitu juga dengan nilai produksi perikanan berada di atas angka 100 dan telah melampaui target tahun 2023.

Beberapa faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar antara lain adalah hasil produksi perikanan dalam waktu berjalan, harga komoditi produksi perikanan yang dihasilkan pada waktu berjalan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk memproduksi komoditi perikanan, harga barang/jasa konsumsi untuk memproduksi produk/komoditas perikanan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari, serta faktor harga ikan yang tidak mudah dikontrol dan dipengaruhi oleh situasi pasar.

IKU 1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur pendapatan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Angka capaian NTN diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh yang diolah oleh DKP Aceh. Persentase tingkat capaian NTN tahun 2023 adalah 107,40 %, dimana Realisasi NTN adalah 110,08% dengan target 102,50%. Realisasi NTN selama lima tahun terakhir dari tahun 2019-2023 mengalami trend positif dimana NTN pada tahun 2019 adalah 101,90, pada tahun 2020 adalah 97,48, tahun 2021 sebesar 105,07, tahun 2022 sebesar 107,79 dan di tahun 2023 yaitu sebesar 110,08, yang mengalami peningkatan sebesar 2,29% dari tahun 2022.

TABEL 3.2. PERKEMBANGAN CAPAIAN NTN TAHUN 2023

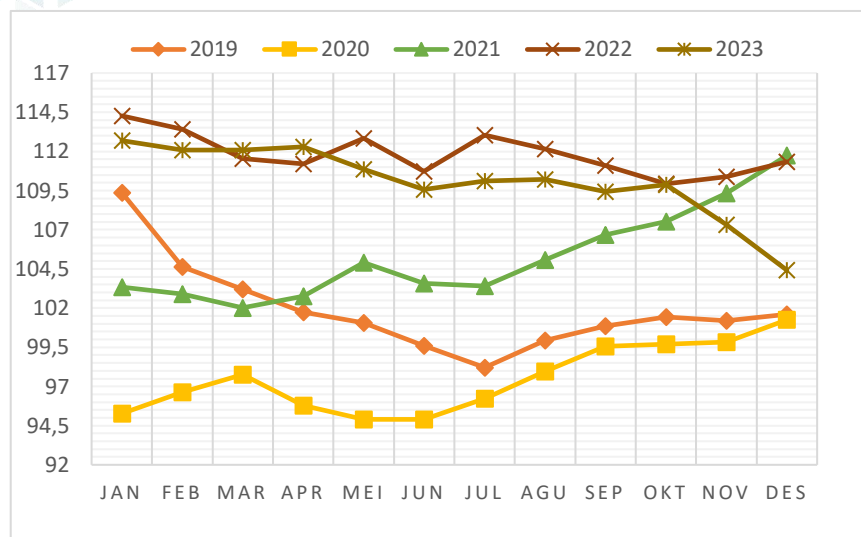
Sasaran Strategis-1				Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan					
IKU-1				Nilai Tukar Nelayan (NTN)					
REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	2023			% KENAIKAN 2019-2023	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN 2023-2026
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN			
101,90	97,48	105,07	107,79	102,50	110,08	107,40	6,76	104,00	105,85

Sumber : BPS Aceh, 2023 (diolah DKP Aceh)

Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan yang semakin meningkat. Keberhasilan pencapaian target Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan dampak peningkatan volume dan nilai produksi perikanan tangkap yang dinikmati oleh nelayan.

Persentase Pertumbuhan NTN pasca covid-19 mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir (2019-2023). Pola persentase NTN bergerak naik di tahun 2021 disebabkan masih terjadinya wabah covid-19 tahun 2019 hingga tahun 2020 yang mengakibatkan penurunan nilai NTN pada tahun tersebut.

GAMBAR 3.1. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR NELAYAN (NTN) PER BULAN SELAMA TAHUN 2019-2023



Selama tahun 2023, NTN mengalami tren relatif stabil di rata-rata angka 110,00. NTN tertinggi berada di awal Januari 2023 dan

terdapat sedikit koreksi/ penyesuaian angka di bulan Juni, Juli, September dan Oktober. Tren naiknya NTN disebabkan naiknya indeks pendapatan nelayan yang disebabkan mulai terjadinya musim ikan dan kondisi subsidi BBM masih dalam kondisi normal dan terkontrol oleh nelayan. Sementara sedikit koreksi/ penyesuaian angka NTN di bulan Juni, Juli, September dan Oktober diduga akibat faktor cuaca yang menyebabkan nelayan tidak melaut sehingga menurunnya hasil tangkapan ikan. Nilai Tukar Nelayan (NTN) selama lima tahun terakhir (2019 s.d 2023) menunjukkan realisasi yang fluktuatif dengan tren sebagai berikut, terdapat penurunan sebesar 2,52% pada NTN di tahun 2019 dibandingkan tahun 2020, tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 5,27%, tahun 2021 ke tahun 2022 NTN mengalami pertumbuhan sebesar 11,83%. Sementara di Tahun 2023 NTN mengalami penurunan sebesar 1,56% dari tahun 2022. Jika dibandingkan dengan target NTN sampai akhir Renstra tahun 2026 sebesar 104, posisi capaian tahun 2022 sudah mencapai 105,84.

Tercapainya target NTN tahun 2023 dikarekan adanya stimulus bantuan ekonomi dalam penanganan efek pandemi covid-19 yang menyebabkan meningkatnya daya beli dari nelayan. Selain itu, juga dipacu oleh penambahan volume dan nilai produksi perikanan tangkap. Disaat yang bersamaan biaya yang harus dikeluarkan oleh nelayan cenderung stabil untuk memenuhi kebutuhan pokok yang dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Sedangkan untuk komponen barang

produksi dan penambahan barang modal dapat ditekan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang mendukung kemudahan akses nelayan terhadap BBM, air/es dan penanganan pasca panen seperti tersedianya cold storage.

Upaya yang telah dilakukan oleh DKP Aceh untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap yang dapat meningkatkan pendapatan nelayan. meningkatkan NTN sebesar 110,08 pada tahun 2023 diantaranya melalui insentif kepada pelaku usaha perikanan tangkap seperti pengadaan cool box, paket pengadaan alat tangkap nelayan, pengadaan rumpon, pengadaan boat fiber, pengadaan mesin, GPS/Fish Finder, Life jacket dan TDKP. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di beberapa lokasi pelabuhan perikanan yang tersebar di beberapa kabupaten kota juga dilakukan untuk mendukung pencapaian produksi perikanan yang optimal.

GAMBAR 3.2. PENINGKATAN SARPRAS PELABUHAN DAN BANTUAN ALAT TANGKAP TAHUN 2023



IKU 2. Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)

Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) merupakan alat ukur pendapatan pembudidaya yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh pembudidaya dengan harga yang dibayarkan oleh pembudidaya. Angka capaian NTPi diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh yang diolah oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

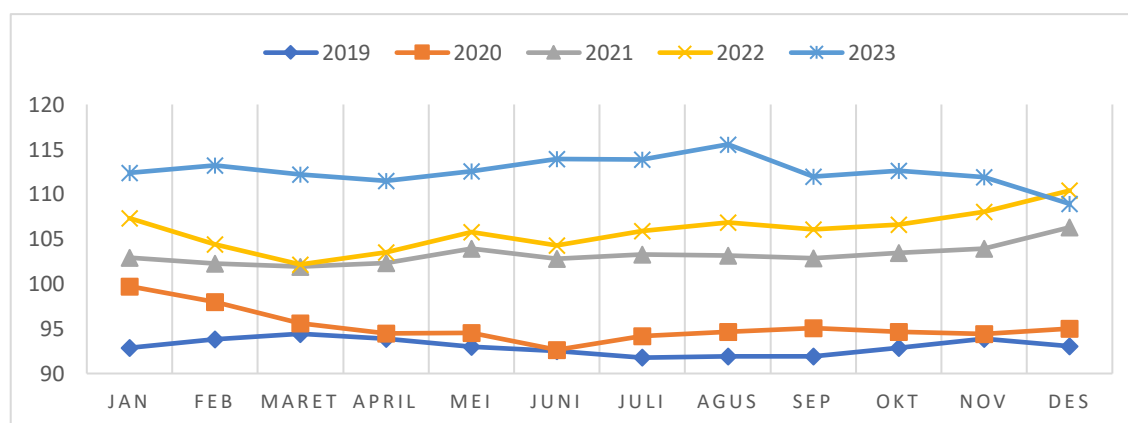
TABEL 3.3. PERKEMBANGAN CAPAIAN NTPi TAHUN 2023

Sasaran Strategis-1				Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan					
IKU-2				Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)					
REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	2023			% KENAIKAN RATA-RATA 2019-2023	TARGET AKHIR RENSTRA	(%) CAPAIAN 2019-2023
				TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN			
92,99	95,24	102,24	105,94	97,54	112,55	115,39	13,40	100,00	112,55

Sumber : BPS Aceh, 2023 (diolah DKP Aceh)

Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) pada tahun 2023 mencapai sebesar 112,55 atau sebesar 115,39 persen dari target. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2026 yang besarnya 100, maka capaian tahun 2023 sudah mencapai target 112,55 persen. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2022 yang capaiannya 105,94, maka terjadi peningkatan sebesar 6,61 persen. Tercapainya target NTPi tahun 2023 disebabkan karena karena peningkatan margin keuntungan penjualan ikan juga disertai peningkatan volume produksi. Selain itu, juga dipicu Bibit/benih dan pakan adalah dua komponen ini yang cukup berpengaruh dan telah diintervensi pemerintah dalam bentuk bantuan pada klaster perikanan budidaya unggulan.

GAMBAR 3.3. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PEMBUDIDAYA IKAN (NTPi) SELAMA TAHUN 2019-2023



Secara rata-rata NTPi tumbuh sebesar 6,63 persen selama tahun 2023, meningkat dari 108,92 menjadi 115,55. Rata-rata Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) sebesar 112,55. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan tahun 2022 berada di atas 100. Selama tahun 2023, NTPi tertinggi berada pada bulan Agustus yaitu sebesar 115,55 dan terendah

berada pada bulan Desember yaitu sebesar 108,92. Dalam kondisi saat ini yang dapat dilakukan guna menjaga indeks NTPi adalah menjaga produktivitas pembudidaya sekaligus menjaga harga komoditas ditingkat pembudidaya tidak turun atau bahkan bisa naik dan menekan biaya yang dikeluarkan oleh pembudidaya.

Penyebab terus membaiknya nilai NTPi ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan bantuan pemerintah dalam mendukung pelaku usaha perikanan budidaya untuk menerapkan teknologi secara optimal dalam proses produksi dan usaha budidaya ikan. Hal tersebut dijabarkan dalam bentuk seperti bantuan pakan yang dapat meminimalisir pengeluaran sistem budidaya, penerapan sistem bioflok untuk pengoptimalan lahan, pakan dan kuantitas hasil panen, bantuan benih dan induk unggul untuk memastikan ikan hasil budidaya berkembang baik dan tahan penyakit, bantuan prasarana dan kebijakan lainnya yang menjadi pemicu naiknya harga jual ikan budidaya dan menekan biaya produksi perikanan budidaya.

GAMBAR 3.4. BANTUAN BENIH, PAKAN DAN SARPRAS PROGRAM BUDIDAYA TAHUN 2023



Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh akan terus berupaya meningkatkan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), melalui pelaksanaan kebijakan yang bersifat afirmatif dan pemberian bantuan pemerintah sebagai salah satu stimulan bagi para pembudidaya serta memperluas akses permodalan bagi usaha budidaya diantaranya melalui (a) bantuan benih unggul (b) pengembangan pakan mandiri melalui penyediaan mesin pellet, dan pembinaan kepembudidaya dan memperbanyak percontohan untuk budidaya pakan mandiri seperti cacing darah, cacing sutra yang diharapkan dapat mengurangi biaya penggunaan pakan; (c)

pengembangan teknologi bioflok untuk menekan Food Conversion Ratio/FCR guna meningkatkan efisiensi pakan dan produktivitas perikanan budidaya.

IKU 3. Produksi Perikanan

Jumlah produksi perikanan merupakan gabungan produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Jumlah hasil produksi perikanan budidaya merupakan produksi yang dihasilkan oleh seluruh kabupaten/kota yang meliputi perikanan tawar, payau dan laut, sedangkan untuk jumlah produksi perikanan tangkap berasal dari produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum daratan.

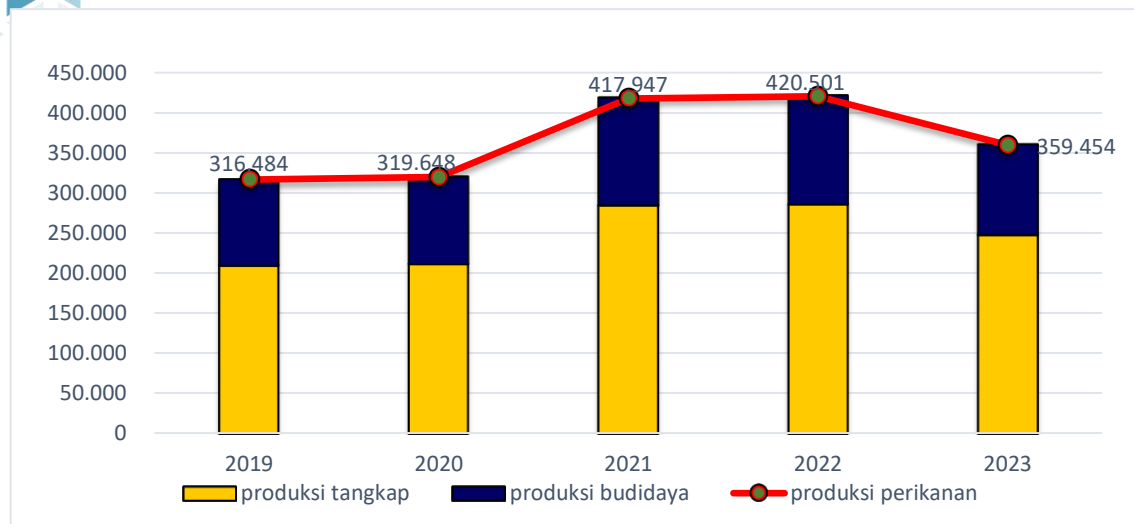
TABEL 3.4. CAPAIAN PRODUKSI PERIKANAN 2023

Sasaran Strategis-1				Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan					
IKU-3				Produksi perikanan (ton)					
REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	2023			% KENAIKAN 2019-2023	TARGET AKHIR RENSTRA	(%) CAPAIAN 2019-2026
				TARGET	REALISASI*	(%) CAPAIAN			
316.483,63	319.648,46	417.947,05	420.500,70	350.131,21	359.453,95	102,66	17,73	390.455,32	92,06

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2023 (diolah DKP Aceh); Ket : * data sementara

Produksi perikanan tahun 2023 ditargetkan 350.131,21 ton, dan realisasinya sebesar 359.453,95 ton atau mencapai 102,66%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 diperkirakan terjadi penurunan sebesar 14,52%, untuk pertumbuhan produksi perikanan selama 5 (lima) tahun 2019-2023 sebesar 17,73%. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra DKP Aceh tahun 2023-2026 yaitu sebesar 390.455.32 ton maka realisasi tahun 2023 telah tercapai sebesar 92,06%. Menurunnya jumlah produksi perikanan tangkap diakibatkan oleh dari beberapa faktor sekaligus. Antara lain, faktor migrasi ikan, kemudian faktor cuaca yang tidak menentu. Sedangkan, penurunan produksi perikanan budidaya disebabkan oleh beberapa hal diantaranya ketersediaan benih di beberapa lokasi yang masih kurang dengan adanya perubahan cuaca yang ekstrem, terbatasnya sentra produksi benih di beberapa lokasi, Adanya kebijakan rasionalisasi jumlah bantuan bibit yang mempengaruhi produksi ikan, selain itu merebaknya penyakit yang mengakibatkan banyak kematian baik pada induk maupun benih untuk beberapa jenis ikan.

GAMBAR 3.5. PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN SELAMA TAHUN 2019-2023



Realisasi produksi perikanan tersebut berasal dari produksi tangkap dan produksi budidaya. Peningkatan produksi tersebut merupakan dampak dari berbagai kebijakan pengelolaan perikanan baik di perikanan tangkap maupun budidaya yang sudah dilakukan oleh DKP Aceh selama tahun 2023.

1. Produksi Perikanan Tangkap

Realisasi produksi perikanan tangkap dilaporkan secara berkala setiap triwulanan, dan capaian tahun 2023 adalah sebanyak 247.434,35 ton atau mencapai 104,31% dari target tahun 2023 yaitu sebesar 237,214,46 ton. Volume produksi perikanan tangkap tersebut berasal dari 97,52% produksi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 241.306,05 ton dan sisanya sebesar 2,47% atau 6.128,30 ton berasal dari tangkapan Perairan Umum Daratan (PUD).

TABEL 3.5. CAPAIAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2019-2023 (TON)

REALISASI				TAHUN 2023*				RENSTRA DKP 2023-2026	
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2019-2023	TARGET	% CAPAIAN TERHADAP TARGET SD 2023
209.174,39	211.266,13	283.676,35	285.094,73	237.214,46	247.434,35	104,31	33,13	231.568,00	106,85

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2023 (diolah DKP Aceh); Ket : * data sementara

Volume produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan rata-rata dari tahun 2019 s.d tahun 2023 dengan periode yang sama sebesar 33,13%, yaitu sebesar

209.174,39 ton pada tahun 2019 menjadi sebesar 247.434,35 ton pada tahun 2023. Sedangkan Capaian 2023 terhadap target akhir Renstra 2023-2026 sebesar 231.568,00 ton maka capaian telah melampaui target sebesar 106,85%.

Terjadinya pertumbuhan angka produksi perikanan tangkap adalah terjadinya kelimpahan ikan di beberapa lokasi di berbagai daerah, Cuaca seperti ombak dan angin masih dalam kondisi tenang sehingga mendukung kegiatan penangkapan ikan. Sedangkan dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan, DKP Aceh di tahun 2023 melakukan peningkatan infrastruktur pelabuhan dan pangkalan pendaratan ikan yang merupakan kegiatan prioritas DKP Aceh, perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di beberapa lokasi, kegiatan tersebut juga telah dapat tercatat dengan baik melalui data statistik perikanan, bantuan alat tangkap yang terus berlanjut serta bantuan hibah langsung ke kelompok nelayan berupa sarana alat bantu penangkapan ikan seperti alat tangkap jaring gillnet, rumpom laut, GPS, lampu celup, fish finder dan mesin kapal di 18 Kab./Kota yang telah disalurkan ditahun 2023, yang merupakan salah satu bantuan stimulus dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap.

Peningkatan produksi perikanan tangkap di laut disebabkan oleh: (1) Nilai komoditas hasil penangkapan ikan di laut lebih tinggi dibandingkan di perairan umum; (2) Implementasi cara penanganan ikan yang baik (CPIB) di atas kapal dan di pelabuhan perikanan menyebabkan kualitas hasil tangkapan di laut lebih baik; (3) Infrastruktur yang mendukung akses terhadap pasar di kawasan pesisir lebih baik dibandingkan dengan fasilitas yang tersedia di sekitar perairan umum daratan; (4) Usaha penangkapan ikan di perairan umum bukan merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat sekitar.

**TABEL 3.6. RINCIAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2019-2023
MENURUT KOMODITAS IKAN UTAMA (TON)**

NO	Rincian	Tahun					Kenaikan Rata-rata/Tahun(%)
		2019	2020	2021	2022	2023*	
I	Perikanan tangkap	209.174,39	211.266,13	283.676,36	285.094,74	247.434,56	33,13
A	Perikanan Tangkap laut	202.899,15	204.921,93	275.116,63	276.526,45	241.306,23	33,22
1	Tuna/Cakalang/Tongkol	110.869,35	111.978,05	150.343,11	151.527,40	142.938,99	34,92
2	Kakap	20.625,58	21.391,61	28.679,73	28.809,16	21.813,19	33,38
3	Kembung	8.821,34	9.517,14	12.759,63	12.772,39	11.772,39	40,49
4	Tenggiri	9.655,25	9.751,80	13.074,24	13.087,32	8.066,78	27,50
5	Selar	18.227,88	19.655,76	26.352,48	26.378,83	20.378,21	37,45
6	Rajungan dan Kepiting	9.444,13	9.538,57	13.023,01	13.036,04	8.019,04	29,93
7	Lobster	4.475,94	4.520,70	6.172,11	6.178,28	6.134,32	37,49
8	Ikan Lainnya	20.779,68	18.568,30	24.712,32	24.737,03	22.183,31	20,48
B	Perikanan Tangkap PUD	6.275,24	6.344,20	8.559,73	8.568,29	6.128,33	30,43
1	Ikan	4.531,37	4.172,20	5.696,30	5.702,00	4.102,00	23,09
2	Udang	1.734,14	2.161,36	1.892,37	1.894,27	1.038,19	3,25
3	Lainnya	9,73	10,64	971,05	972,02	988,14	9036,17

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2023 (diolah DKP Aceh); Ket : * data sementara

Proporsi produksi perikanan tangkap tahun 2023, terdiri dari 96,99% produksi perikanan tangkap laut dan 3,01% produksi perikanan tangkap PUD. Produksi perikanan tangkap di laut tahun 2023 berdasarkan komoditas utama menunjukkan komoditas tuna/cakalang/tongkol mencapai 142.938,99 ton, kakap mencapai 21.813,19 ton, kembung mencapai 11.772,39 ton, tenggiri mencapai 8.066,78 ton, selar mencapai 20.378,21 ton, rajungan dan kepiting mencapai 8.019,04 ton, lobster mencapai 6.134,32 ton dan komoditas ikan lainnya mencapai 22.183,31 ton, sedangkan pada perikanan tangkap PUD terdiri dari komoditas ikan 4.102,00 ton, udang 1.038,19 ton, dan jenis lainnya mencapai 988,14 ton. Pertumbuhan perikanan tangkap di laut dan perairan umum berdasarkan komoditas utama dalam kurun waktu 2019-2023 menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap Aceh secara total mengalami peningkatan yang fluktuatif, dari triwulan I hingga triwulan IV tahun 2024.

Untuk memacu peningkatan volume produksi perikanan tangkap, ke depan perlu dilakukan upaya dan kegiatan antara lain optimalisasi operasional bantuan sarana penangkapan ikan, percepatan pembangunan pelabuhan PPI P3D, peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, Optimalisasi pendataan produksi perikanan tangkap di pusat-pusat pendaratan termasuk tangkahan, Penguatan pendataan dan penambahan SDM pengumpulan data di area WPP 571 dan WPP 572.

2. Produksi Perikanan Budidaya

Capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 sebesar 112.019,60 ton dan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 yakni sebesar 112.916,75 ton maka capaian produksi perikanan budidaya adalah sebesar 99,21%. Produksi perikanan budidaya tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 135.405,97 ton atau 20,87%.

TABEL 3.7. CAPAIAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2019-2023 (TON)

REALISASI				TAHUN 2023*				RENSTRA DKP 2023-2026	
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2019-2023	TARGET	% CAPAIAN SD 2023
107.309,24	108.382,33	134.270,70	135.405,97	112.916,75	112.019,60	99,21	22,28	119.418,38	93,80

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2023 (diolah DKP Aceh); Ket : * data sementara

Jika dilihat selama periode 2019-2023, volume produksi perikanan budidaya selama waktu tersebut terus mengalami peningkatan dengan kenaikan rata-rata per tahunnya sebesar 22,28% per tahun dari 107.309,24 ton di tahun 2019 menjadi 112.916,75 ton di tahun 2023. Sedangkan realisasi volume produksi perikanan budidaya tahun 2023 sebesar 112.916,75 ton atau mencapai 93,80% apabila dibandingkan dengan target akhir renstra 2023-2026 yaitu sebesar 119.418,38 ton.

TABEL 3.8. RINCIAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2019-2023 MENURUT KOMODITAS UTAMA (TON)

NO	Rincian	Tahun					Kenaikan Rata-rata/Tahun(%)
		2019	2020	2021	2022	2023*	
I	Perikanan Budidaya	107.309,24	108.382,33	134.270,70	135.405,97	112.019,60	22,28
1	Bandeng	16.101,71	16.262,73	22.351,54	22.530,35	21.121,44	37,99
2	Belanak	2.112,47	2.133,60	-	-	-	0,20
3	Mas	9.096,21	9.187,17	11.162,41	11.251,71	8.231,71	17,93
4	Lele	19.598,21	19.794,19	24.049,94	24.242,34	16.125,66	16,60
5	Patin	480,82	485,63	590,04	594,76	622,19	24,22
6	Nila	13.590,24	13.726,14	16.677,26	16.810,68	9.626,89	14,75
7	Kerapu	2.415,51	2.439,67	2.964,19	2.987,91	2.122,44	17,51
8	Udang	42.239,06	42.661,45	54.446,48	54.943,17	53.113,20	28,87
9	Ikan Lainnya	1.675,00	1.691,75	2.028,82	2.045,05	1.056,08	12,05

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2023 (diolah DKP Aceh); Ket : * data sementara

Produksi perikanan budidaya tahun 2023 berdasarkan komoditas utama menunjukkan komoditas udang yang merupakan produksi tertinggi mencapai 53.113,20 ton, kemudian diikuti oleh bandeng mencapai 21.121,44 ton, ikan lele

mencapai 16.125,66 ton, nila mencapai 9.626,89 ton, ikan mas mencapai 8.231,71 ton, kerapu mencapai 2.122,44 ton, patin mencapai 622,19 ton dan ikan lainnya mencapai 1.056,08 ton. Pertumbuhan perikanan budidaya berdasarkan komoditas utama dalam kurun waktu 2019-2023 menunjukkan bahwa produksi perikanan budidaya di Aceh secara total mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 22,28%.

Meningkatnya pertumbuhan produksi perikanan budidaya selama lima tahun terakhir antara lain disebabkan oleh meningkatnya pembudidayaan udang jenis vaname dengan sistem intensif sehingga mampu meningkatkan produksi udang Aceh. Selain itu juga dipacu oleh produksi ikan lele yang dibudidayakan dengan sistem bioflok yang mampu meningkatkan produksi. Adapun kebijakan pemerintah dalam bentuk stimulus ekonomi mampu menggairahkan petani kolam atau tambak untuk mengelola kembali usaha budidainya, yang ditopang dengan meningkatnya permintaan pasar dari jenis komoditi unggulan budidaya.

Peningkatan volume produksi perikanan budidaya tahun 2023 secara keseluruhan untuk semua komoditas utama didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Industrialisasi perikanan budidaya, dengan fokus pada komoditas udang, bandeng dan ikan lele. Kegiatan utama dalam industrialisasi, khususnya untuk usaha udang dan lele adalah bantuan sarana dan prasarana (benih unggul, pakan dan penerapan teknologi sistem bioflok) dan pendampingan teknis budidaya;
- Pengembangan sistem produksi melalui (i) Pengembangan input teknologi yang sesuai standar (teknologi anjuran), aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan; (ii) Meningkatkan daya saing produk hasil produksi budidaya melalui percepatan pelaksanaan kegiatan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB); (iii) Pengembangan percontohan usaha perikanan budidaya sebagai upaya dalam mensosialisasikan model pengelolaan budidaya berkelanjutan;
- bantuan pemerintah berupa revitalisasi lahan tambak dan kolam, benih dan pakan, alat produksi budidaya dan lainnya yang dipusatkan berdasarkan

pada pengembangan kawasan komoditas unggulan klaster perikanan budidaya;

- Pengembangan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan melalui kegiatan terobosan utama pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Balai Benih Ikan Pantai;

B. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan

IKU 4. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh

Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perikanan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perikanan. Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan merupakan perubahan PDRB (atas dasar harga berlaku) sektor perikanan dari satu periode ke periode berikutnya. PDRB Perikanan tersebut hanya didasarkan pada sektor primer yang mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Berdasarkan data BPS, distribusi PDRB sub sektor perikanan atas harga berlaku tahun 2023 adalah sebesar 5,62% atau memenuhi 106,04% dari target tahun 2023 yaitu 5,30%. Dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB tahun 2022 yang besarnya 5,18% maka mengalami pertumbuhan sebesar 0,44% dan kenaikan rata-rata per tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 1,24%. Realisasi pertumbuhan PDRB sub Perikanan tahun 2023 telah mencapai 103,12% dari target akhir Renstra yang ditetapkan yakni sebesar 5,45%. Membaiknya capaian PDRB sub sektor perikanan tahun 2023 tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi covid 19 sehingga mampu meningkatkan aktifitas ekonomi sub sektor perikanan. Disisi lain, diikuti dengan peningkatan produksi tangkapan yang melimpah dan meningkatnya permintaan komoditas perikanan.

**TABEL 3.9. CAPAIAN PERTUMBUHAN PDRB SUBSEKTOR PERIKANAN
TAHUN 2023**

Sasaran Strategis-2				Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan					
IKU-1				Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh					
REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	2023**			% KENAIKAN 2019-2023	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN 2019-2026
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN			
5,23	5,57	5,15	5,18	5,30	5,62	106,04	1,24	5,45	103,12

Sumber : BPS Aceh, 2023 (diolah DKP Aceh); Ket : ** = data sangat sementara

Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan PDRB antara lain: (1) meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui pengembangan budidaya payau dengan meningkatkan bantuan sarana dan prasarana budidaya, (2) meningkatkan produksi perikanan tangkap dengan meningkatkan bantuan boat/perahu dan alat bantu penangkapan, (3) meningkatkan promosi investasi dibidang kelautan dan perikanan dengan melakukan kerjasama dengan Badan Investasi dan Promosi Aceh serta melakukan bisnis forum dengan stakeholders kelautan dan perikanan, (4) Mendorong sinergi kebijakan dan program dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk peningkatan usaha kelautan dan perikanan baik skala UMKM maupun skala menengah dan besar.

IKU 5. Nilai Ekspor Perikanan (USD)

Selama dua tahun yaitu tahun 2019-2023, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan tercapainya sasaran strategis meningkatkan neraca perdagangan perikanan yaitu dengan melihat tingkat ekspor perikanan Aceh. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh menggunakan satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu nilai ekspor perikanan (USD).

Nilai ekspor perikanan adalah jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar, dingin, maupun olahan yang dijual ke luar negeri yang dikonversi dalam bentuk uang (US Dollar). Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh.

TABEL 3.10. CAPAIAN NILAI EKSPOR PERIKANAN ACEH TAHUN 2019-2023

Sasaran Strategis-2				Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan				
IKU-2				Nilai ekspor perikanan (USD)				
REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	2023*			TARGET AKHIR RENSTRA	(%) CAPAIAN 2019-2023
				TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN		
2.986.439,00	1.837.400,00	2.051.244,00	2.359.588,00	2.153.806,00	2.141.627,00	99,43	2.461.493,00	87,01

Sumber : BPS Aceh, 2023 (diolah DKP Aceh); Ket : *= data sementara

Pada tahun 2023, realisasi nilai ekspor perikanan sebesar 2.141.627,00 USD atau telah mencapai 99,43 % dari target tahun 2023 yaitu sebesar 2.153,806,00 USD. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar 2.359.244,00 USD, capaian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 9,24%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra DKP Aceh 2017-2022 yaitu sebesar 2,4 juta USD, realisasi tahun 2023 telah mencapai 87,01%.

Terdapat lima komoditas penyumbang terbesar nilai ekspor hasil perikanan tahun 2023 yaitu udang dan kepiting mencapai 1,17 juta USD (54,75%), (tuna,tongkol,cakalang) mencapai 0,817 juta (38,19%), kerapu sebesar 0,12 juta USD (5,78%), dan lobster sebesar 0,024 juta USD (1,28%).

Salah satu penyebab meningkatnya nilai ekspor perikanan tahun 2023 dikarenakan meningkatnya produksi komoditas utama seperti udang vaname, yang menyebabkan peningkatan volume ekspor jenis udang segar dan juga terjadinya peningkatan volume tangkapan ikan jenis tuna, tongkol dan cakalang.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- Negara pengimpor produk perikanan seperti singapura, china dan jepang semakin memperketat kriteria dan kualitas produk impornya, seperti jaminan keamanan produk perikanan dan non-IUU, sustainability dan traceability;
- Beberapa produk perikanan Indonesia dinilai belum memenuhi standar kualitas pasar Jepang;
- Potensi diversifikasi tujuan pasar baru seperti Afrika, Timur Tengah, Rusia, dan Amerika Latin masih mengalami hambatan, mengingat Indonesia belum mempunyai Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) sehingga akses pasar ke kawasan tersebut belum terbuka secara maksimal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan, antara lain:

- Pengembangan diversifikasi dan penguatan branding produk ekspor yang didukung dengan hasil riset dan pemantauan pasar;
- Peningkatan mutu produk kelautan dan perikanan untuk komoditas ekspor yang bernilai ekonomis penting seperti udang, tuna, lobster dll melalui pengembangan sistem rantai dingin, sertifikasi mutu, dan pemenuhan persyaratan dari negara pengimpor;
- Mendorong penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal perikanan dan supplier dan Cara Budidaya Ikan yang Baik;
- Percepatan penyelesaian hambatan ekspor dan perluasan pasar ekspor;
- Berpartisipasi aktif dalam kerjasama dengan organisasi perdagangan internasional dan pemerintah negara tujuan ekspor dalam rangka peningkatan akses pasar produk perikanan;
- Memperbaiki distribusi pasokan bahan baku;
- Peningkatan jejaring pasar domestik dan internasional melalui promosi dagang seperti partisipasi dalam pameran.

IKU 6. Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)

Konsumsi ikan adalah jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan neraca permintaan ikan untuk konsumsi domestik. Ikan mencakup ikan segar dan olahan sesuai dengan ketentuan dari BPS. Target konsumsi ikan tahun 2023 adalah sebesar 59,37 kg/kapita/tahun.

Meningkatnya produksi ikan Aceh telah mendorong meningkatnya ketersediaan ikan untuk konsumsi daerah. Presiden juga telah memerintahkan para Menteri untuk mengkampanyekan gemar makan ikan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Sehat, dengan melibatkan seluruh komponen/elemen bangsa dengan membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). DKP Aceh dalam berbagai kesempatan juga terus mengkampanyekan gemar makan ikan kepada anak-anak

dan ibu hamil dalam rangka memberikan kualitas kehidupan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Memastikan penyediaan bahan makanan yang mengandung protein ikan dapat dilihat jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan neraca permintaan ikan untuk konsumsi domestik dalam pemenuhan kebutuhan bahan makanan protein ikan. Dalam hal ini, DKP Aceh menghitung Angka Konsumsi Ikan berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS, dengan komponen yang dihitung mencakup konsumsi dalam rumah tangga (ikan dan udang segar/basah, ikan dan udang awetan dan makanan jadi), konsumsi di luar rumah tangga (konsumsi di restoran, rumah makan, hotel, rumah sakit, dan sekolah), dan konsumsi ikan olahan seperti baso ikan, nugget, somay, pempek, kerupuk ikan, ikan kayu dll.

TABEL 3.11. CAPAIAN ANGKA KONSUMSI IKAN TAHUN 2023

Sasaran Strategis-2				Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan					
IKU-3				Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)					
REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	2023			% KENAIKAN 2019-2023	TARGET AKHIR RENSTRA	(%) CAPAIAN 2019-2026
				TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN			
58,97	59,32	60,07	60,58	59,37	65,93	111,05	11,63	59,52	110,77

Sumber : BPS Aceh, 2023 (diolah DKP Aceh)

Capaian Angka Konsumsi Ikan tahun 2023 adalah 65,93 kg/kapita/tahun, atau naik 5,35% dibandingkan dengan capaian tahun 2022, yang besarnya 60,58 kg/kapita/tahun. Capaian tahun 2023 telah memenuhi target sebesar 59,37 kg/kapita/tahun atau mencapai 111,05% dari target. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kegemaran masyarakat Aceh dalam mengkonsumsi ikan. Selain menunjukkan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap ikan.

Apabila dibandingkan dengan target dalam Renstra DKP Aceh Tahun 2023-2026, yang besarnya 59,52 kg/kapita/tahun, maka capaian tahun 2023 telah melampaui target yaitu 110,77% dari target akhir periode lima tahun. Hal ini juga menunjukkan bahwa produksi perikanan diserap pasar dalam negeri dan industri perikanan bergerak. Untuk meningkatkan angka konsumsi ikan, juga dilakukan promosi peningkatan konsumsi ikan didalam Provinsi Aceh. Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung meningkatkan konsumsi ikan di Aceh antara lain :

- Penguatan melalui kampanye meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kandungan gizi & manfaat ikan, menumbuhkan kreativitas dalam mengolah ikan & usaha kuliner sebagai sumber pendapatan keluarga;
- Meningkatkan keanekaragaman produk olahan hasil perikanan untuk memenuhi tuntutan selera konsumen;
- Kegiatan Sistem Logistik Ikan diharapkan dapat menjamin ketersediaan ikan sepanjang tahun baik di sentra produksi maupun di sentra konsumen/industri dengan mutu baik dan harga stabil;
- Gerakan Masyarakat Makan Ikan (GEMARIKAN) dalam rangka penanganan Stunting dan Inflasi di Aceh;
- Bazar rumah ikan higienis.

Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan konsumsi ikan per kapita daerah adalah :

- Di beberapa wilayah masih kebiasaan masyarakat untuk makan ikan yang rendah;
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat protein ikan bagi kesehatan dan kecerdasan;
- Rendahnya suplai ikan di beberapa wilayah;
- Sarana pemasaran dan distribusi masih terbatas;
- Diversifikasi produk hasil perikanan yang bisa memenuhi tuntutan konsumen masih belum berkembang.

GAMBAR 3.6. KEGIATAN GEMARIKAN DALAM MENINGKATKAN KONSUMSI IKAN DI ACEH



IKU 7. Produksi Garam

Kebutuhan garam akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan industri pengguna garam. Kebutuhan garam dalam daerah sampai saat ini belum bisa dipenuhi dari produksi garam daerah karena beberapa faktor yaitu teknologi yang masih tradisional, alih fungsi lahan tambak menjadi kawasan industri atau permukiman, serta produksi garam yang sangat dipengaruhi cuaca. Ada dua langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam yaitu ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru dan intensifikasi dengan inovasi teknologi dan manajemen lahan pegaraman.

Produksi garam Aceh merupakan penjumlahan dari produksi garam rakyat yang terdapat di 8 Kabupaten/Kota. Target produksi garam tahun 2023 berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebesar 10.600,00 ton.

TABEL 3.12. CAPAIAN PRODUKSI GARAM TAHUN 2019-2023 (TON)

REALISASI				TAHUN 2023*				RENSTRA DKP 2023-2026	
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% PENINGKATAN 2019-2023	TARGET	% CAPAIAN
12.548,98	9.659,24	13.495,05	12.012,61	10.600,00	9.388,90	88,57	1,33	10.900,00	86,14

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2023 (diolah DKP Aceh); Ket : * data sementara

Sampai dengan triwulan IV tahun 2023, produksi garam mencapai 9.388,90 ton atau mencapai 42,59 % dari target yang ditetapkan. Realisasi produksi garam di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 21,84% apabila dibandingkan dengan produksi garam tahun 2022 yaitu sebesar 12.012,61 ton. Penyebab tidak tercapainya produksi garam terhadap target tahun 2022. Hal ini disebabkan karena banyak petani garam yang mengurangi kapasitas produksinya karena lesunya permintaan pasar bahkan beberapa pabrik pengolah garam menutup usahanya walaupun demikian, suplai garam bahan baku masih tetap terjaga

meskipun produksinya menurun. Selain itu, musim hujan yang lebih panjang dan masih banyaknya petani garam berskala tradisional yang memproduksi garam dengan sistem perebusan sehingga juga mengurangi produksi garam.

Target 10.600 ton sulit terpenuhi karena program ekstensifikasi lahan belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Di sisi lain, teknologi pergaraman yang

telah dikembangkan belum mampu meningkatkan produksi garam secara signifikan. Jumlah produksi garam tahun 2023 sedikit lebih menurun dibandingkan tahun 2021 karena musim panas yang lebih panjang. Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung capaian produksi garam, yaitu melalui Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR). PUGaR merupakan program nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan petambak garam rakyat dan mendorong terwujudnya Swasembada Garam. Berikut rincian distribusi jumlah produksi garam di kabupaten penghasil garam.

TABEL 3.13. PRODUKSI GARAM (TON) PER KABUPATEN SENTRA GARAM ACEH

NO	KAB/KOTA	PRODUKSI (TON)				
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023*
1	Aceh Selatan	144,12	148,88	114,20	108,57	91,80
2	Aceh Barat Daya	70,76	84,32	80,78	74,99	93,70
3	Aceh Besar	749,03	978,68	991,36	732,00	495,50
4	Pidie	4.768,02	1.016,90	3.777,67	3.803,01	4.748,80
5	Pidie Jaya	650,01	825,42	2.952,78	2.864,85	1.809,80
6	Bireuen	4.173,84	4.242,16	3.950,86	3.354,42	910,70
7	Aceh Utara	1.420,20	2.033,29	1.423,08	881,39	1.038,40
8	Aceh Timur	573,00	329,59	204,32	193,38	200,20
TOTAL PRODUKSI		12.548,98	9.659,24	13.495,05	12.012,61	9.388,90

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2023 (diolah DKP Aceh); Ket : * data sementara

Pada tahun 2023 produksi garam tertinggi terdapat pada Kabupaten Pidie sebesar 4.748,80 ton, kemudian diikuti Kabupaten Pidie Jaya sebesar 1.809,80 ton, Aceh Utara sebesar 1.038,40 ton, Bireuen sebesar 910,70 ton, Aceh Besar sebesar 495,5 ton, Aceh Timur sebesar 200,20 ton, Aceh Barat Daya sebesar 93,70 ton dan Aceh Selatan sebesar 91,80 ton.

Beberapa kendala dalam pencapaian target produksi garam antara lain : 1) produksi garam masih tergantung dengan cuaca, teknik produksi masih tradisional dengan kemampuan SDM yang terbatas, disisi lain inovasi teknologi masih terbatas dan memerlukan biaya tinggi; 2) Program ekstensifikasi di delapan Kabupaten/Kota belum berjalan dengan baik; 3) Lahan integrasi yang dilaksanakan di tahun 2023, beberapa daerah masih belum berproduksi hingga akhir musim sehingga proses rekonsiliasi/penataan lahan terlambat 4) Rendahnya harga garam menyebabkan banyak petambak enggan untuk berproduksi karena biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan;

Solusi terhadap kendala pencapaian kinerja di atas, yaitu: Implementasi rumah tunnel dan rumah prisma di beberapa daerah melalui dana APBN/APBA agar produksi garam dapat dilakukan pada musim penghujan; peningkatan kapasitas SDM dibidang produksi garam dan marketing; ekstensifikasi lahan dengan melibatkan BUMN dan swasta (proses karena melibatkan instansi lainnya). Beberapa hal sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan produk garam antara lain Percepatan penyelesaian rekonsiliasi/penataan lahan integrasi agar dapat berproduksi secara optimal, manajemen stok dengan melibatkan gudang-gudang rakyat yang telah mendapatkan SNI berkoordinasi dengan gudang garam nasional (GGN) yang telah ada dengan skema resi gudang, ekstensifikasi lahan dan perencanaan integrasi lahan dilakukan sebelum tahun pelaksanaan kegiatan.

Capaian produksi garam tahun 2023 didukung oleh kegiatan :

- Modernisasi produksi garam dari proses perebusan menjadi sistem rumah tunnel;
- Pengembangan usaha garam melalui pembinaan, revitalisasi lahan dan bantuan sarana produksi garam.

GAMBAR 3.7. MODERNISASI PRODUKSI GARAM DI TAHUN 2023



IKU 8. Persentase Kawasan Konservasi yang dikelola

Menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN) kawasan konservasi merupakan suatu area yang memiliki batas geografis jelas, diakui, ditujukan, dan dikelola secara legal (formal) atau oleh (aturan) cara-cara efektif lainnya untuk mencapai tujuan jangka panjang konservasi alam serta jasa-jasa ekosistem dan nilai budaya yang berasosiasi dengannya. Manfaat Kawasan Konservasi sebagai berikut:

1. Keanekaragaman Hayati: mempertahankan spesies dan ekosistem target serta spesies lain didalamnya.
2. Perikanan: ikan dewasa berlimpah dan bereproduksi lebih efektif, memungkinkan anak-anak ikan mendapat cukup makanan serta tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, ikan dewasa akan menyebar ke perairan yang kurang padat (spill over), dan larva-larva ikan juga akan terbawa arus keluar kawasan (export larvae).
3. Manfaat Sosial, Ekonomi dan Budaya: mengurangi konflik, membangun kerjasama, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mempertahankan kearifan lokal.

Tantangan luasnya kawasan konservasi di Aceh adalah pengelolaan kawasan konservasi tersebut sehingga dapat menunjukkan manfaat keberadaan kawasan konservasi terhadap keanekaragaman hayati, perikanan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Di samping hal tersebut, tantangan lain adalah status dari kawasan konservasi itu sendiri. Dalam hal untuk mengetahui sejauh mana tingkat sejauh mana kegiatan-kegiatan pengelolaan mencapai tujuan-tujuan pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan pada tahun 2021, maka diperlukan adanya suatu evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Didalam pelaksanaan pengelolaan nya, mengikuti PERMEN KP 31/2020 tentang Pengelolaan kawasan konservasi yang memuat pembentukan, pengelolaan, pemanfaatan, dan evaluasi pengelolaan. Kawasan Konservasi yang operasional adalah Kawasan konservasi yang telah ditetapkan yang dioperasikan pengelolaannya dalam rangka peningkatan kualitas target konservasi. DKP Aceh mendukung operasionalisasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur Aceh seluas 171.115,84 Ha yaitu 68.446,34 Ha.

Evika dilakukan menggunakan perangkat ukur yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Nomor 28/KEPDJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kawasan konservasi dievaluasi dengan serangkaian pertanyaan yang dikategorikan berdasarkan kriteria input, proses, output, dan outcome. Evaluasi efektivitas ini telah mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya menjadi

tanggung jawab SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola). Hasil penilaian dari keseluruhan indikator tersebut akan menjadi bahan untuk evaluasi pengelolaan kawasan konservasi yang bersifat adaptif. Secara lebih detil, kerangka pikir disajikan pada Gambar di bawah ini:



Gambar 3.8. KERANGKA PENILAIAN EVIKA

Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi disajikan pada tabel sebagai berikut:

TABEL 3.14. STATUS EVALUASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50 – 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari

Penilaian EVIKA (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi) merupakan standar alat ukur pengelolaan kawasan konservasi, sesuai petunjuk teknis keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2020.

TABEL 3.15. CAPAIAN PERSENTASE KAWASAN KONSERVASI YANG DIKELOLA 2021-2023

Sasaran Strategis-2		Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan					
IKU-5		Persentase kawasan konservasi yang dikelola (%)					
REALISASI 2021	REALISASI 2022	2023*			% Kenaikan 2021-2023	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN 2023-2026
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN			
29,97	41,53	40,00	41,98	104,95	38,92	65,00	64,58

Sumber : DKP Aceh, 2023

Pada tahun 2023 persentase Kawasan konservasi yang dikelola mencapai 41,98% atau 104,95% dari target yang ditetapkan awal tahun sebesar 40%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 41,53% mengalami peningkatan sebesar 1,07% dengan pertumbuhan rata-rata per tahun selama 2021-2023 sebesar 38,92%. Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan ditargetkan seluas 70 ribu ha dan telah dilakukan penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi pada 7 Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD).

Kawasan Konservasi Perairan Daerah Aceh tersebar di 7 Kab/Kota meliputi Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Kab. Aceh Besar, Kota Sabang, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue dan Aceh Tamiang. Penilaian EVIKA Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Aceh telah dilakukan penilaian sejak tahun 2021, 2022 dan terbaru pada tahun 2023. Hasil dari penilaian dapat dilihat pada tabel 3.16 dibawah :

TABEL 3.16. HASIL PENILAIAN EVIKA KKPD ACEH 2021-2023

No.	Kawasan Konservasi Perairan Daerah	Penilaian Evika Tahun			Kriteria Pengelolaan
		2021	2022	2023	
1.	S. A. Pesisir Timur Pulau Weh Kota Sabang	32,02	40,94	52,78	Optimum
2.	S. A. Perairan Aceh Besar	32,64	45,73	50,46	Optimum
3.	Taman Pesisir Aceh Tamiang	27,84	34,71	31,54	Minimum
4.	Taman Pesisir Aceh Jaya	28,66	42,07	45,25	Minimum
5.	S. A. Perairan Aceh Barat Daya	28,25	39,05	30,61	Minimum
6.	S. A. Perairan Aceh Selatan	28,66	34,23	30,61	Minimum
7.	S. A. Perairan PISISI Simeulue	31,74	53,98	52,66	Optimum
		29,97	41,53	41,98	

Sumber : DKP Aceh, 2023

Memperhatikan hasil penilaian EVIKA di 7 Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Aceh yang dilaksanakan di oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sejak tahun 2021 hingga sampai dengan tahun 2023 telah terjadi peningkatan kriteria pengelolaan. Pada tahun 2021 seluruh Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Aceh masih ber kriteria pengelolaan minimum, pada penilaian EVIKA pada tahun 2022 meningkat kriteria pengelolaan yaitu 1 Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Kabupaten Simeulue meningkat kriteria menjadi dikelola secara optimum sedangkan 6 Kawasan Konservasi Perairan Daerah lainnya masih ber kriteria dikelola secara minimum. Kemudian pada penilaian EVIKA pada tahun 2023 terjadi peningkatan kriteria pengelolaan yaitu ber kriteria dikelola secara optimum terhadap Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Kota Sabang, Aceh Besar dan Simeulue sedangkan 4 Kawasan Konservasi Perairan Daerah lainnya di Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan masih ber kriteria pengelolaan minimum. Hal yang menarik terjadi penurunan persentasi angka kriteria pengelolaan di 5 Kawasan Konservasi Perairan Daerah. Peningkatan dan penurunan persentasi angka EVIKA disebabkan rendahnya intervensi pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang berkaitan dengan Input, Output/proses dan Outcome/hasil yang diikat oleh kewenangan dan tupoksi para pihak terkait.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai target IKU selama tahun 2023 di antaranya :

- a. Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- b. Identifikasi Potensi Calon Kawasan Konservasi Perairan dan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Percepatan penetapan Kawasan Konservasi Daerah dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi syarat penetapan kawasan konservasi;
- d. Fasilitasi penetapan kawasan konservasi dengan adanya penambahan kawasan baru melalui Pencadangan oleh Gubernur;
- e. Dengan mengoptimalkan kerjasama dengan stakeholders terkait seperti akademisi, NGO, masyarakat, pemerintah kabupaten kota untuk

meningkatkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan kawasan Konservasi perairan di Aceh.

Gambar 3.9. KEGIATAN PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL



IKU 9. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha Kelautan dan Perikanan (KP) adalah kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh para pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan IKU "Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" terealisasi sebesar 69% dari target 62% Tahun 2023. Kepatuhan pelaku usaha KP diperoleh dari rata-rata persentase kepatuhan: 1) Pelaku usaha kapal perikanan; 2) Pelaku usaha pengolahan ikan; 3) Pelaku usaha distribusi hasil perikanan; dan 4) Pelaku usaha budidaya perikanan. Capaian IKU Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan disajikan pada table 3.17.

TABEL 3.17. CAPAIAN PERSENTASE KAWASAN KONSERVASI YANG DIKELOLA 2021-2023

Sasaran Strategis-2		Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan				
IKU-6		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku %				
REALISASI 2022	2023*			% Kenaikan 2022-2023	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN 2023- 2026
	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN			
60,33	62,00	69,00	111,29	7,19	70,00	98,57

Sumber : DKP Aceh, 2023; Ket : *=Angka sementara

Realisasi kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tahun 2023 pada Tabel 3.16 adalah 69% atau meningkat 8,67% dibandingkan tahun 2022 dengan realisasi sebesar 60,33%. Apabila

dibandingkan dengan target akhir Renstra KKP 2023-2026 sebesar 70%, realisasi tahun 2023 telah mencapai 98,57%. Peningkatan capaian di tahun 2023 disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Kegiatan penyadartahuan yang gencar dilakukan kepada Masyarakat melalui program mengajar dalam bentuk Kampanye maupun sosialisasi khususnya di wilayah yang rawan terjadi praktik illegal dan destructive Fishing;
2. Peningkatan kapabilitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pembinaan teknis, pendidikan dan pelatihan;
3. Konsistensi DKP dalam melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan disertai dengan pemberian pemahaman secara komprehensif kepada para pelaku usaha;
4. Kerjasama yang terjalin dengan instansi penegak hukum, perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

Meskipun capaian telah melebihi target, namun terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

1. Masih ditemukan pelaksanaan pengawasan tidak sesuai dengan rencana pengawasan yang ditetapkan;
2. Beberapa permasalahan yang ditemukan dilapangan seperti perbedaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI), alamat perusahaan, dan perusahaan yang sedang menjalani sanksi administrasi perlu ditindaklanjuti berupa koordinasi dengan pihak terkait agar bisa diselesaikan dan berjalan sesuai dengan ketentuan

3.3. Kinerja Anggaran DKP Aceh

Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai ini diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup DKP Aceh kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pada tahun 2023, APBA DKP Aceh semula sebesar Rp. 91.327.545.325,- dan terdapat penyesuaian menjadi Rp. 88.135.386.419,- dengan Nilai Kinerja Anggaran ditargetkan sebesar 95,00%/kategori baik, dan terealisasi sebesar 97,73%/kategori baik atau 102,87% dari target. Apabila dibandingkan dengan realiasi tahun 2022 yaitu sebesar 95,97%, realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,76%.

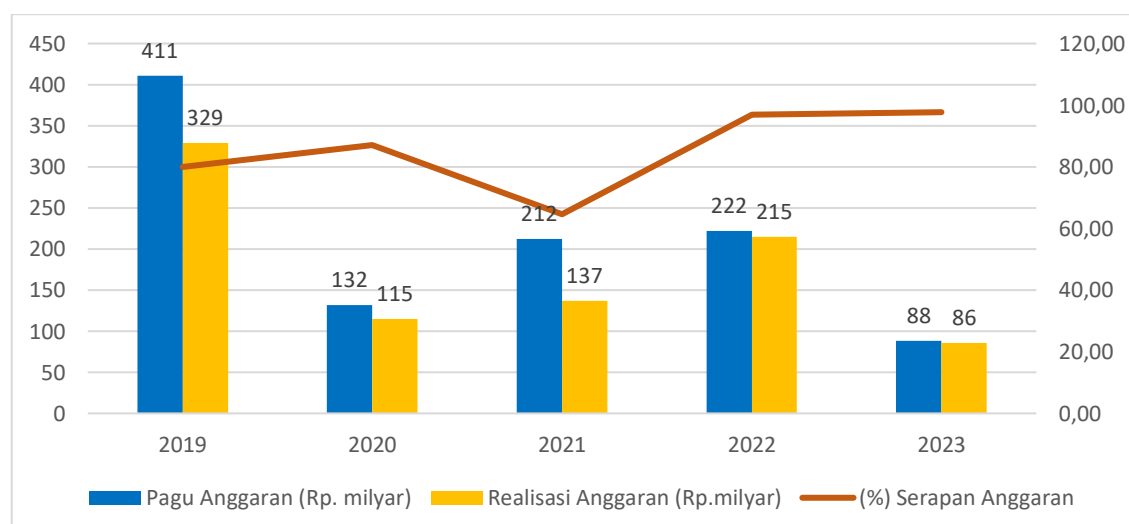
TABEL 3.18. CAPAIAN NILAI KINERJA ANGGARAN DKP ACEH TAHUN 2023

REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	2023			% RATA-RATA KENAIKAN SERAPAN ANGGARAN 2019-2023
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
79,91	87,40	64,58	95,97	95,00	97,73	102,87	32,24

Sumber : DKP Aceh, 2023

APBA DKP tahun 2019 sampai 2023 digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap eselon III lingkup DKP Aceh, baik yang dilaksanakan oleh Dinas, maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Alokasi anggaran tahun 2023 digunakan untuk pembiayaan enam program yaitu : program penunjang urusan pemerintahan daerah, program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Perkembangan pagu dan realisasi DKP sebagaimana tabel berikut.

GAMBAR 3.10. GRAFIK PAGU, REALISASI DAN SERAPAN ANGGARAN APBA DKP ACEH TAHUN 2019-2023



Penyerapan anggaran DKP Aceh tahun 2023 cenderung positif yang mengalami peningkatan sebesar 1,76% apabila dibandingkan dengan tahun 2022. Mengingat ditahun 2023, pelaksanaan dan pencapaian pembangunan menghadapi tantangan besar pada masa pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang tentu saja berdampak hampir disemua sektor dengan terputusnya mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri yang pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi.

TABEL 3.19. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DKP ACEH BERDASARKAN PROGRAM 2023

PROGRAM	TAHUN 2023		
	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.675.859.585	39.082.861.180	98,51
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	2.035.078.777	2.032.681.749	99,88
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	33.837.855.791	32.720.023.489	96,70
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	9.252.852.448	9.186.479.950	99,28
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	1.059.022.135	1.053.554.874	99,48
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.274.717.683	2.274.715.575	100,00
Jumlah	88.135.386.419	86.350.316.817	97,97

Sumber : DKP Aceh, 2023

Berdasarkan tabel di atas, realisasi penyerapan anggaran tertinggi yaitu pada Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebesar 100,00% dan realisasi terendah pada Program penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 98,51%.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023 diantaranya :

1. Adanya kendala pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain ketersediaan bahan, keterbatasan SDM, kesiapan pihak penyedia, banjir, cuaca buruk;
2. Adanya pekerjaan yang tidak cukup masa waktu pengerjaan, karenanya tidak dapat diselesaikan oleh pihak ketiga sampai batas waktu pengerjaan berakhir.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka percepatan realisasi anggaran diantaranya:

1. Penyusunan anggaran telah memperhatikan urutan prioritas program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Pembangunan yang tercantum dalam dokumen RPA 2023-2026;
2. Meminta kesanggupan penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;
3. Seluruh kegiatan pada Eselon III lingkup DKP Aceh dapat dilakukan pemantauan oleh Tim Monev untuk pendampingan secara aktif terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada unit kerja/mitranya masing-masing;

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Gubernur Aceh. Laporan Kinerja ini telah memasuki tahun pertama pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu alat Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dilakukan upaya penyelesaiannya. Untuk itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh perlu mengantisipasi perubahan di tahun 2023 yang berpotensi mempengaruhi capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama.

Sepanjang tahun 2023, Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh telah menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan semakin meningkatnya capaian Kinerja beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun demikian, beberapa Indikator Kinerja Utama masih belum tercapai atau memerlukan kerja keras untuk dapat mencapainya di tahun 2024 disebabkan pencapaiannya Indikator Kinerja Utama tersebut mengalami perlambatan. Secara umum Nilai rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis DKP Aceh pada Tahun 2023 adalah 104,67% atau

mengalami kenaikan 11,02% dibandingkan rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022 93,65%. Sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh terdapat 2 sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan, (2) Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan, yang nilai capaiannya diatas 100%.

Pada tahun 2023, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh semula mengelola anggaran APBA sebesar Rp. 91.327.545.325,- dan terdapat penyesuaian menjadi Rp. 88.135.386.419,- . Nilai Kinerja Anggaran yang ditargetkan sebesar 95,00% (kategori baik) dan realisasi yang diperoleh sebesar 97,97% (kategori baik) atau 101 % dari target. Apabila dibandingkan dengan realiasi tahun 2021 95,97%, maka realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,00%.

Dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022, melalui penajaman program dengan mengedepankan aspek keberpihakan dan pemerataan antar wilayah. Untuk itu, rencana aksi/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain adalah :

- A. Untuk Bantuan Pemerintah DKP Aceh kedepan, penyaluran bantuan agar berfokus untuk menyasar masyarakat kelautan dan perikanan yang tepat agar menyumbangkan nilai kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah dan mengentaskan angka kemiskinan di Aceh.
- B. Dalam rangka mendukung sasaran strategis, meningkatkan produksi perikanan dan kelautan, perlu adanya dukungan optimalisasi perikanan budidaya melalui aplikasi teknologi yang tepat guna, insentif/ bantuan benih, pakan dan sarana prasarana budidaya ikan kepada pelaku usaha budidaya ikan air payau dan air tawar. Sedangkan pada penangkapan ikan perlu dioptimalkan penyaluran bantuan/ insentif armada tangkap, alat tangkap, alat bantu tangkap, sarana prasarana pendukung lainnya serta dukungan optimalisasi sarpras pelabuhan perikanan dan tempat pendaratan ikan.
- C. Identifikasi biofisik dan sosial ekonomi potensi kawasan konservasi baru, yaitu di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh

Tamiang. Hasil identifikasi potensi tersebut diharapkan dapat dicadangkan sebagai kawasan konservasi baru.

- D. Pembangunan sentra kelautan dan perikanan untuk meningkatkan ekonomi lokal melalui peningkatan mutu hasil perikanan, ikut partisipasi dalam pameran produk perikanan nasional maupun internasional dan akses permodalan sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai ekspor hasil perikanan Aceh.
- E. Optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pemenuhan sarana prasarana pengawasan dan peningkatan kemampuan SDM, guna memastikan keberlanjutan/ kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku.

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut berbagai upaya telah dilakukan oleh segenap jajaran di lingkungan DKP Aceh. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan bidang terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota serta lembaga terkait lainnya akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan/segenap jajaran di seluruh DKP Aceh serta dukungan dari stakeholder terkait.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 2. Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) 3. Produksi Perikanan (ton) - Produksi Perikanan Tangkap (ton) - Produksi Perikanan Budidaya (ton)	102,50 97,54 350.131,21 237.214,46 112.916,75
2.	Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	4. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh (%) 5. Nilai Ekspor Perikanan (USD) 6. Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun) 7. Produksi Garam (ton) 8. Persentase kawasan konservasi yang dikelola (%) 9. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	5,30 2.153.806,00 59,37 10.600,00 40,00 62,00

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	: Rp 40.863.104.000
2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	: Rp 2.072.785.666
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	: Rp 34.863.091.000
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	: Rp 10.030.000.000
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	: Rp 1.153.803.000
6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	: Rp 2.344.761.659

Pj. GUBERNUR ACEH

ACHMAD MARZUKI

Banda Aceh, 2023
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH


ALIMAN, S.PI, M.Si

2. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2026 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan					105,79		
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	111,83	102,50	110,08	107,40	104,00	105,85
		Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	105,94	97,54	112,55	115,39	100,00	112,55
		Produksi Perikanan (ton)	420.500,70	350.131,21	359.453,95 *	102,66	390.455,32	92,06
		- Produksi Perikanan Tangkap (ton)	285.094,73	237.214,46	247.434,35 *	104,31	271.036,94	91,29
		- Produksi Perikanan Budidaya (ton)	135.405,97	112.916,75	112.019,60 *	99,21	119.418,38	93,80
2	Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan					103,56		
		Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh (%)	5,15	5,30	5,62 *	106,04	5,45	103,12
		Nilai Ekspor Perikanan (USD)	2.359.588,00	2.153.806,00	2.141.627,00 *	99,43	2.461.493,00	87,01
		Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	60,58	59,37	65,93 **	111,05	59,52	110,77
		Produksi Garam (ton)	18.384,98	10.600,00	9.388,90	88,57	10.900,00	86,14
		Persentase kawasan konservasi yang dikelola (%)	-	40,00	41,98	104,95	65,00	64,58
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	-	62,00	69,00	111,29	70,00	98,57

3. Penghargaan Tahun 2023



Piagam Penghargaan diberikan kepada Achmad Marzuki Pj. Gubernur Aceh Atas dedikasi, kerja keras dan capaian kinerjanya dalam mendukung pelaksanaan Program Nasional Pemberantasan Kegiatan Penangkapan Ikan dengan Cara yang Merusak (*Destructive Fishing*). Yang diserahkan oleh Dirjen Pengawasan Kementrian Kelautan dan Perikanan, Laksda TNI Dr. Adin Nurawaluddin, M.Han dan Diterima Oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Aliman, S.Pi. M.Si pada acara Pisah Sambut Komandan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo.



PPID Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelola Data